

11-20-2020

PROBLEMATIKA MANAJEMEN RISIKO DALAM MITIGASI TERORISME KELOMPOK FETO DI TURKI PADA MASA PRESIDEN ERDOGAN

Mega Prastika
Universitas Indonesia, prastika.mega@gmail.com

Dwi Impiani
Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

Recommended Citation

Prastika, Mega and Impiani, Dwi (2020) "PROBLEMATIKA MANAJEMEN RISIKO DALAM MITIGASI TERORISME KELOMPOK FETO DI TURKI PADA MASA PRESIDEN ERDOGAN," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 2 : No. 2 , Article 7.
DOI: [10.7454/jts.v2i2.1027](https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1027)
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol2/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF
Terrorism Studies

**Problematika Manajemen Risiko dalam Mitigasi Terorisme Kelompok
FETO di Turki pada Masa Presiden Erdogan**

Mega Prastika
Universitas Indonesia
prastika.mega@gmail.com

Dwi Impiani
Universitas Indonesia

Abstract

This article aims to describe the new risks that emerged in mitigating the risk of FETO (Fethullah Gulen Terrorist Organization) in Turkey during President Erdogan's era. By having its own view of the state order and its strong network in 150 countries, the Gulen Movement is considered to threaten the existence of the ideology of the Turkish state, especially during the leadership of President Erdogan. After the failed coup attempt on July 15, 2016, the Gulen Movement was designated as a dangerous group called FETO as it was considered responsible for the incident. Furthermore, the Turkish government adopted an anti-terror policy that was preventive to repressive by implementing risk management in it. This article uses a qualitative method with data collection techniques in the form of literature studies which include: Official Document Based, and Internet Based Research. Using Selchow's (2014) four dynamics, this article finds that the actions taken by the Turkish government have an impact on the emergence of new problems and risks. These risks include the degradation of democracy and human rights violations, especially for Turkish citizens who are exposed to the "clean the state" agenda.

Keywords : FETO, Gulen Movement, Risk Management, Terrorism

Pendahuluan

Keberadaan terorisme mulai dikenal pasca tragedi 9/11 dan membuat terorisme menjadi isu yang disekuritisasi oleh berbagai negara karena dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan negara. Hoffman (2009) mengatakan bahwa sebuah

definisi yang pasti terhadap terorisme masih menjadi sebuah perdebatan. Menurutnya, terorisme berbeda dengan kejahatan kriminal lainnya, karena terorisme merupakan sebuah aksi yang terencana, terkalkulasi, dan sistematis yang diarahkan kepada masyarakat (Hoffman,

2009). Terorisme juga identik dengan penggunaan kekerasan yang diarahkan kepada masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan politik (Rohman, Syaiful & Nurhasanah, Siti 2019).

Dalam menanggulangi masalah terorisme, sebuah negara pada umumnya akan mengambil langkah-langkah kebijakan anti-teror dengan menggunakan manajemen risiko di dalamnya untuk meminimalisir dampak dari teror tersebut. Hampir semua negara di belahan dunia telah berusaha memerangi terorisme yang dianggap mengancam kedaulatan serta keamanan negaranya termasuk negara Turki. Dikutip melalui Mehmet E. Yaya (2009), menurut Central Intelligence Agency (CIA), Turki merupakan salah satu mitra kunci dalam perang melawan terorisme global. Karakteristik geopolitik negara dan ikatannya yang kuat dengan masyarakat barat membuat Turki sangat menarik untuk dipelajari.

Rodoplu et al. (2013) dalam Yaya (2009), mengatakan bahwa berkisar antara tahun 1985 dan 2006 terdapat tiga jenis kelompok terorisme aktif di Turki yaitu kelompok teroris separatis Kurdi, kelompok teroris Islam Radikal, dan kelompok teroris kiri. Ideologi kelompok-kelompok ini tidak saling terpisah satu sama lain dan terkadang tumpang tindih. Namun, pada tahun 2013 sebuah gerakan yang bernama *Gulen Movement* atau

Gerakan Gulen dianggap sebagai organisasi ilegal bagi pemerintahan Turki yang mengancam keamanan negaranya.

Melihat sekilas perjalanannya, *Gulen Movement* merupakan salah satu kekuatan politik dan ekonomi paling kontroversial di Turki yang memberikan pengaruh terhadap demokratisasi Turki yang gagal pada tahun 2000-an dan kaitannya dengan awal kebangkitan Recep Tayyip Erdogan. *Gulen Movement* dipimpin oleh seorang imam besar atau ulama berkebangsaan Turki yang bernama Fethullah Gulen. Hakki Tas (2018) menyebut bahwa hubungan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Fethullah Gulen sebagai “hubungan dari kebangkitan ke persaingan”.

Kudeta pada 15 Juli 2016 yang gagal merupakan tonggak penting dalam politik Turki. Pemerintah Turki menyatakan bahwa *Gulen Movement* merupakan aktor yang bertanggung jawab terhadap kudeta tersebut dengan melibatkan jaringan militer dan didukung oleh individu non-militer serta kelompok yang diketahui berafiliasi untuk Gulen (Kementerian Luar Negeri Turki). Kudeta ini dianggap sebagai bentuk serangan teroris untuk menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Hakki Tas (2018) menggambarkan bagaimana mantan sekutu Erdogan ditunjuk sebagai organisasi teroris. Dalam

artikelnya, Tas (2018) menjelaskan bagaimana citra *Gülenists* telah berubah dalam proyeksi Partai Keadilan dan Pembangunan atau *Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)*, partai yang dipimpin oleh Erdogan, dari ‘komunitas agama’ menjadi

‘pennsylvania’ ke ‘Parallel State’, dan akhirnya ke *Gülenist Terror Organization (FETO)* yang digambarkan melalui sebuah skema. (Gambar 1)

Gambar 1: *Gülen’s Movement in AKP’s Discourse*



G: Fethullah Gülen, C: Gülen’s Inner Circle, B: The Base of Gülen Movement; (+,-) in AKP’s projection

Sumber: Hakki Tas. A history of Turkey’s AKP-Gülen conflict. *Mediterranean Politics*, 2018.

Secara historis, Erdogan dan Gulen menemukan pengaruh mereka di berbagai cabang dan tradisi dalam aktivisme Islam di Turki. Namun berbagai pengamat menyatakan bahwa perbedaan antara sudut pandang mayoritas elite Partai AKP, termasuk Recep Tayyip Erdogan, dengan Fethullah Gulen sama dengan perbedaan antaran Islam Politik dan Islam Budaya (Tas, 2018). Fethullah Gulen menggunakan pendekatan bertahap yang berfokus pada islamisasi masyarakat dari bawah ke atas. Gerakan ini juga disebut *Hizmet* (Layanan) dan lebih dikenal karena menginvestasikan modal serta energinya dalam menjalankan 2000 sekolah di 160 negara. Gulen cenderung melepaskan diri dari segala jenis Islam politik dengan tujuan menghindari konfrontasi dengan negara. Gerakan Gulen

sendiri mulai didirikan pada awal tahun 1970-an. Sejak tahun 1974, Gulen mulai mencari sekutu strategis dan mengembangkan jaringannya di Kaukasia, Asia Tengah (Kementrian Luar Negeri Turki). Setelah peristiwa tragis 9/11, gerakan Gulen memperkenalkan dirinya sebagai kekuatan liberal, moderat, demokratis di zaman teror Islam. Gulen yang tinggal di Pennsylvania sejak tahun 1999 mulai menjalankan sebuah kerajaan besar yang terdiri dari institusi pendidikan, perusahaan, pusat media dan asosiasi masyarakat sipil melalui jaringan *clandestine*. *Gülen Movement* secara bertahap berkembang menjadi komunitas dengan struktur yang jelas. Gulen berdiri di puncak diikuti oleh urutan hierarki “*abiler*”

(kakak laki-laki) yang dibagi menjadi beberapa peringkat (Tunggul, 2018: 145).

Pada tahun 2002 – 2010, hubungan antara *Gülenists* dan AKP digambarkan sebagai aliansi strategis dalam mengejar keuntungan bersama. Aliansi strategis ini memungkinkan kedua kelompok untuk mengesampingkan perbedaan mereka. AKP (seperti yang dilakukan kaum Gülen) menahan diri untuk tidak memusuhi elite negara dengan tantangan sekularisme. Kemudian, kedua aktor mulai berbagi agenda pro-Barat yang berusaha mempromosikan proses keanggotaan Uni Eropa Turki dan liberalisasi pasar. Keduanya juga menggabungkan kekuatan pelengkap mereka sebagai cara untuk bertahan dari lingkungan sekuler yang bermusuhan. Sementara AKP diuntungkan dari sumber daya manusia terdidik Gerakan Gülen dalam birokrasi negara, Gerakan Gülen menemukan peluang untuk berkembang lebih jauh di bidang sosial, ekonomi, dan birokrasi (Tas, 2018:397).

Tahun 2010 sampai dengan 2013 disebut sebagai periode '*hidden confrontation*'. Pada periode ini sudah tidak ada lagi aliansi strategis. Perbedaan di beberapa domain mulai muncul seperti misalnya, strategi *Gülenist* untuk menghindari gangguan status internasional quo berbenturan dengan ambisi Presiden Erdogan untuk menjadi kekuatan utama di dunia Muslim. Kemudian *Gülenist*

menuntut bagian kekuasaan yang lebih besar, sedangkan Erdogan bertekad untuk memusatkan kekuasaan negara di tangannya sendiri dan mengesampingkan bahkan rekan-rekan partainya (Tas, 2018:398). Meskipun gesekan antara AKP dan Gerakan Gülen memiliki sejarah yang jauh lebih lama, aliansi strategis mereka menyembunyikan perbedaan ini. Konflik Mavi Marmara tahun 2010 merupakan konflik pertama bagi keduanya. Menjelang pemilihan umum Juni 2011, Erdogan menolak untuk memasukkan lebih dari seratus kandidat pro-Gülen dalam daftar partai yang menyebabkan ketegangan lebih lanjut. Protes Gezi pada tahun 2013 semakin membuat aliansi keduanya menjadi rapuh (Tas, 2018)

Selanjutnya, pada tahun 2013-2016 hubungan Erdogan dan Gülen memasuki masa *Overt Confrontation*. Pada periode ini konflik antara kedua kubu mulai muncul ke permukaan secara terang-terangan. Pemerintah mulai melakukan rencana penutupan sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan *Gülen Movement*. *Gülenist* menganggap hal ini sebagai tindakan untuk melumpuhkan gerakannya sehingga *Gülenist* menanggapi dengan melakukan penyelidikan korupsi ke partai politik AKP. Akibatnya, pada akhir 2013 polisi menangkap beberapa orang termasuk pengusaha, putra menteri atas tuduhan korupsi dalam perdagangan minyak rahasia

Turki dengan Iran. Sebagai balasannya, pemerintah menyita media grup pro-Gülen, Samanyolu dan Zaman Grup. Pemerintah juga menuduh *Gülenist* di kepolisian dan peradilan dengan tuduhan mendirikan ‘negara paralel’ dalam pelayanan ‘aliansi gelap’. Pada tahun 2014, Dewan Keamanan Nasional Turki secara eksplisit merujuk “*Pararel State Structure*” sebagai organisasi teroris untuk pertama kalinya. (Tas, 2018)

Istilah FETO pertama kali digunakan dalam laporan keamanan rahasia pada Maret 2015 yang merujuk pada Organisasi Teror *Gülenist* atau Penataan Negara Paralel (PYD). Pada Oktober 2015, pemerintah Turki memasukan Gulen sebagai pemimpin FETO. Dengan demikian Gulen masuk dalam daftar teroris paling dicari bersama para pemimpin PKK dan ISIS. Istilah FETO merujuk pada semua pengikut dan simpatisan Gulen sebagai bagian dari organisasi teroris (Tas, 2018)

Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden Erdogan memandang terorisme, khususnya dalam kasus FETO adalah paham yang terartikulasi dalam sebuah gerakan kelompok yang menentang arah kebijakan negara. Secara sederhana, Presiden Erdogan memandang bahwa terorisme adalah paham atau ideologi yang berpotensi membahayakan negara, sehingga jika ada

suatu kelompok yang memiliki karakteristik paham terorisme harus diperangi. Presiden Erdogan atau bahkan Turki tentu saja diperkenan memiliki pemahaman tersendiri terhadap terorisme karena memang tidak ada definisi absolut terkait terorisme. Bahkan definisi terorisme bisa jadi berbeda di setiap negara, bergantung pada kasus yang melatarbelakangi fenomena teror tersebut muncul. Maka dari itu, penulis memandang bahwa terorisme adalah paham atau ideologi yang hadir bertentangan dengan tujuan sebuah negara atau nilai-nilai universal dan memberikan dampak ketakutan bagi pihak luas. Dalam kasus FETO, gerakan Gulen akhirnya ditetapkan sebagai kelompok teror karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Presiden Erdogan yang merupakan representasi negara Turki pada saat itu.

Pergeseran hubungan yang terjadi antara keduanya telah memicu pemerintah Turki untuk mengambil tindakan anti-teror terhadap Gerakan Gulen. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negerinya, Turki menyatakan bahwa akan mengambil semua langkah yang diperlukan dalam batas-batas aturan hukum yang menghormati hak-hak dasar kebebasan, dengan mematuhi kewajiban internasionalnya untuk melawan organisasi ini dan mendesak masyarakat internasional untuk mendukungnya dalam

menghilangkan ancaman ini. Namun langkah manajemen risiko dalam mitigasi risiko kelompok FETO ini justru memicu timbulnya problematika baru. Agenda “pembersihan” pihak-pihak baik individu maupun organisasi yang terafiliasi oleh FETO telah memicu timbulnya rasa takut dan cemas yang tinggi di dalam masyarakat serta hilangnya hak sebagian masyarakat sipil dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, berkurangnya lapangan kerja, dan lain sebagainya. Pemecatan terhadap lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, dan akademisi (BBC, 2018) sampai dengan pembekuan paspor seorang pemain klub NBA Oklahoma City yang dianggap terafiliasi dengan FETO dilakukan oleh pemerintah Turki (Hardoko, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis risiko baru yang muncul dalam mitigasi risiko terorisme kelompok FETO pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan menggunakan pendekatan empat dinamika manajemen risiko yang dikembangkan oleh Selchow (2014).

Metode Riset

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan membentuk studi kasus yang membahas sebuah isu secara spesifik. Untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dari permasalahan yang

dirumuskan, penulis berusaha mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain berupa studi literatur yang meliputi: *Official Document Based*, dan *Internet Based Research*.

Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menangani terorisme, manajemen risiko merupakan sebuah konsep untuk meminimalisir dampak dari tindakan teror. Konsep risiko kontemporer yang kini dipahami secara luas adalah suatu pertimbangan ketidakpastian berdasarkan perbuatan manusia di masa mendatang, bukan berdasarkan pertimbangan (bencana) alam. Maka dari itu, risiko adalah tentang keputusan dan tanggung jawab (Selchow, 2014). Keputusan ini diambil berdasarkan imajinasi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Logika risiko itu sendiri ditujukan untuk perhitungan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keputusan hari ini. Dalam kata lain logika risiko adalah ‘entitas perhitungan buatan’ (Krasman, 2007: 306 dalam Selchow, 2014). Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar pembuatan kebijakan keamanan, termasuk kebijakan anti-teror yang kemudian dikenal dengan manajemen risiko.

Penggunaan konsep ini dapat dilihat dari perluasan makna keamanan dan juga makna ‘ancaman keamanan’. Jika pada

beberapa dekade silam ancaman keamanan memiliki wajah yaitu negara, saat ini ancaman tidak memiliki wajah yang jelas. Inggris merupakan salah satu negara yang menyadari hal ini, kemudian menerapkan konsep ini dalam strategi keamanan nasionalnya di Tahun 2012. Konsep ini dituangkan dalam dokumen keamanan nasional Inggris yang menyebutkan bahwa ancaman hari ini berbentuk terorisme, serangan dunia maya, serangan tidak konvensional (senjata biologi dan kimia), bahkan bencana alam (termasuk *climate change*). Pergeseran konsep keamanan ini menandakan peningkatan ketergantungan terhadap logika risiko (Selchow, 2014)

Menurut pandangan Selchow (2014), peningkatan ketergantungan terhadap logika risiko ini bisa dilihat dalam empat dinamika yaitu; 1) dinamika pemisahan tindakan politik dari dasar aktualitas; 2) dinamika depolitisasi pembuatan kebijakan keamanan; 3) dinamika internalisasi masalah keamanan global; dan 4) dinamika memperluas proses sekuritisasi.

Dinamika pertama yaitu dinamika pemisahan tindakan politik dari dasar aktualitas (*the Dynamic of the Decoupling of Political Acts from the Grounds of Actuality*). Menurut Selchow (2014:72) dinamika ini merupakan praktik logika risiko 'ketidakamanan'. Tindakan politik yang diambil suatu negara bukan

berdasarkan kejadian yang aktual, melainkan pada perhitungan kemungkinan bahaya di masa mendatang. Tindakan politik ataupun kebijakan keamanan yang bersandar pada logika ini lebih memusatkan perhatian pada upaya pencegahan dari pada tindakan reaksi.

Dinamika kedua adalah dinamika depolitisasi pembuatan kebijakan keamanan (*the Dynamic of a Depolitization of (Security) Policymaking*). Selchow (2014:72) melihat dinamika ini melalui tiga aspek. Aspek pertama yaitu kepura-puraan objektivitas. Selchow (2014) menjelaskan kepura-puraan objektivitas dalam analogi sistem penargetan otomatis milik Amerika Serikat di bandara. Sistem tersebut memiliki kemampuan membaca data individu dan menilai apakah individu tersebut ancaman atau bukan tanpa melihat nilai-nilai lain. Jika individu tersebut terdeteksi sebagai ancaman, maka petugas bandara akan melakukan tindakan pencegahan di bandara dengan menangkap atau tindakan preventif lainnya sebelum individu tersebut memasuki negara Amerika Serikat. Aspek kedua yaitu pengkategorisasian kasus individu. Aspek ini tidak melihat keterlibatan dengan individu manusia (dan sejarah pribadi mereka), melainkan tentang keterlibatan individu dengan faktor, jenis, dan kategori. Hal ini dijelaskan Selchow (2014) sebagai upaya pengkodean dalam bidang keamanan

untuk tujuan penilaian "risiko" keamanan. Adapun aspek ketiga yaitu penerapan logika risiko yang tidak mengenal normatif benar atau salah (bebas nilai). Selchow (2014:73) menggunakan pandangan Niklas Luhmann (yang dikutip dalam Reith, 2004, hlm. 399) bahwa teknologi "risiko" dapat dengan mudah mengarah pada situasi paradoks di mana "keputusan yang salah adalah benar", selama "benar" sesuai dengan penilaian aturan dan prosedur risiko. Melalui ketiga aspek ini manajemen risiko bekerja dalam depolitisasi kebijakan keamanan.

Dinamika ketiga yaitu dinamika internalisasi masalah keamanan global dan proses responsabilisasi (*the Dynamic of an "Internalization" of (Global) Security Issues and the Process of Responsibilization*). Selchow (2014:74) memandang bahwa meskipun cara kerja logika risiko tidak tunduk pada nilai normatif benar dan salah, tetapi justru internalisasi masalah keamanan global menggunakan aspek moral manusia untuk bertanggung jawab. Dengan menggunakan contoh kasus penanganan isu terorisme di Amerika Serikat, Selchow (2014: 75) menunjukkan peran pemerintah AS terutama Departemen Dalam Negeri AS yang menghimbau warganya untuk melaporkan tindakan yang disinyalir berasosiasi dengan terorisme kepada pihak berwajib dan menjadikan keamanan publik

tanggung jawab semua orang. Dengan cara ini, negara menjadikan isu keamanan global atau eksternal menjadi isu keamanan internal dengan melibatkan semua orang sehingga menjadikan isu tersebut mendapatkan perhatian lebih.

Dinamika yang keempat yaitu dinamika memperluas proses sekuritisasi (*the Dynamic of an Expanding Process of 'Securitization'*). Selchow (2014:75) menjelaskan dinamika ini dalam dua aspek. Aspek pertama yaitu logika risiko menyiratkan bahwa suatu kejadian atau ancaman tidak bisa dihindari, maka dari itu mendorong keharusan suatu negara untuk bertindak (imperatif). Aspek kedua yaitu logika risiko yang berpusat pada tindakan preventif menuntut negara menjadi produktif. Karena upaya pencegahan terus dimodifikasi dari waktu ke waktu, membuat negara produktif melakukan berbagai tindakan seperti tindakan imbalan, hukuman, dorongan, pengawasan, dll. Kedua aspek inilah yang membuat proses sekuritisasi semakin meluas dan membentuk masyarakat secara fundamental.

Melalui keempat dinamika ini, penulis menarik simpulan bahwa empat dinamika ini juga menjadi indikator suatu negara menerapkan manajemen risiko dalam kebijakan keamanannya, termasuk kebijakan anti-teror. Empat dinamika ini juga yang akan digunakan sebagai

kerangka analisis atau pendekatan dalam melihat upaya pemerintah Turki pada masa Presiden Erdogan dalam memitigasi terorisme, khususnya kelompok FETO. Setelah itu penulis akan melihat dampak yang dihasilkan dari penerapan manajemen risiko dalam kebijakan anti-teror oleh pemerintah Turki pada masa Presiden Erdogan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintahan Turki pada masa Presiden Erdogan telah menetapkan kelompok FETO sebagai kelompok teror yang harus diperangi untuk kepentingan “*clean the state*”, karena jaringan kelompok ini dianggap telah masuk ke dalam berbagai institusi pemerintahan dan berbagai bidang lain. Nama FETO (*Fetullah Terrorist Organization*) itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Presiden Erdogan terhadap kelompok ini, karena pada awalnya kelompok ini hanya dikenal dengan istilah *Gülenists* atau *the Gulen Movement* untuk menandai gerakan yang diinspirasi oleh sosok Fetullah Gulen. Bahkan anggota dari kelompok ini pun tidak menyebut diri mereka sebagai *Gülenists*, melainkan menyebut gerakan mereka sebagai “*Service*” atau dalam bahasa Turki disebut “*Hizmet*” (Aydintasbas, 2016). Penamaan yang diberikan pemerintah Turki ini memperlihatkan indikasi bahwa negara melihat kelompok ini sebagai ancaman, karena kata teroris hari ini diasosiasikan

dengan ancaman. Selain itu, penyematan kata teroris pada kelompok ini mampu membangun persepsi bahaya masyarakat secara luas terhadap kelompok FETO. Kasus ini berujung pada sekuritisasi dan kriminalisasi gerakan keagamaan melalui *framing* yang dipimpin pemerintah (Taş, 2018).

Melihat dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Erdogan, manajemen risiko dalam mitigasi terorisme adalah langkah yang diambil pemerintah dalam memerangi kelompok FETO dan berbagai jaringannya, terutama pasca kudeta di Turki pada 15 Juli tahun 2016 (Taş, 2018). Hal ini bisa dilihat melalui empat dinamika milik Selchow (2014) yang terjadi di Turki. Tulisan ini selanjutnya akan memaparkan empat dinamika penanda penerapan manajemen risiko dalam mitigasi terorisme di Turki pada masa Presiden Erdogan.

1) Dinamika Pemisahan Tindakan Politik dari Dasar Aktualitas

Agenda utama dari kelompok FETO diyakini oleh pemerintah Turki adalah mengguglingkan pemerintahan yang ada dan menggantikannya dengan pemerintahan yang tatanannya sesuai dengan ideologi mereka. Anggota dari kelompok ini pun dipercaya telah memasuki berbagai institusi pemerintahan seperti badan intelijen, kepolisian, militer, dan

berbagai bidang lainnya. Pemerintah Turki memiliki kekhawatiran terkait anggota kelompok FETO yang tersebar di berbagai tubuh pemerintahan di Turki, bahkan memiliki jaringan luas di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam ruang lingkup global.

Kekhawatiran ini diwujudkan dengan tindakan-tindakan politik yang tidak berangkat dari dasar aktualitas seperti pengajuan ekstradisi Fethullah Gulen selaku pemimpin kelompok FETO yang tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat karena dianggap berbahaya (Aydintasbas, 2016). Dalam pengadilan hukum ekstradisi di Amerika Serikat, otoritas negara Turki mencoba meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Gulen dan warga Turki yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok FETO dengan mengutarakan betapa bahayanya jaringan ini. Jaksa penuntut Turki mengajukan 25-27 halaman dakwaan terhadap Gulen atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta yang menewaskan 240 orang (Dogan, 2020). Selain itu, Gulen dituntut untuk dihukum

dua hukuman sekaligus yaitu seumur hidup karena ‘berusaha menghancurkan konstitusional dengan paksa’ dan ‘membentuk dan menjalankan kelompok teroris bersenjata’ (Dogan, 2020). Kementerian Kehakiman Turki secara resmi meminta Amerika Serikat untuk menangkap Gulen karena memerintahkan dan memimpin upaya kudeta. Dalam pengadilan itu juga kelompok FETO diasosiasikan dengan kelompok semisal Illuminati, Opus Dei, Moonies, atau bahkan al-Qaeda, hingga diklaim terlibat dalam pemberontakan Gezi 2013 dan jatuhnya jet tempur Rusia pada November 2015 (Aydintasbas, 2016). Tetapi pemerintah AS memiliki pandangan lain terhadap Gulen dan warga Turki yang tinggal di AS dan menganggap bahwa kesaksian pemerintah Turki terlalu berlebihan.

Dinamika pemisahan tindakan politik dari dasar aktualitas yang dilakukan oleh pemerintah Turki juga terlihat pada hasil sidang atau investigasi yang tidak berhasil mengungkapkan bukti keterlibatan atau hubungan para tersangka dengan kelompok FETO, tetapi tersangka tetap menjalani hukuman

penjara. Aydintasbas (2016) mengungkapkan bahwa pemerintah Turki menangkap sekitar 10.000 komplotan dalang kudeta dengan menggunakan dasar undang-undang darurat yang dikeluarkan Presiden Erdogan di tahun 2016. Sekitar 100.000 pegawai negeri dan guru sektor swasta yang diduga terlibat dengan kudeta 2016 diberhentikan dari pekerjaan mereka. Setelah penetapan keadaan darurat oleh Presiden Erdogan, penahanan pra-judikasi telah diperluas menjadi 30 hari dan tidak ada hukum yang mampu melawan keputusan pemerintah. Pada masa ini, pemerintahan Turki juga membalik prinsip praduga tidak bersalah dan warga negara diperlakukan sebagai 'tersangka' bersalah sampai terbukti tidak bersalah (Taş, 2018:402).

Tindakan politis tanpa bukti yang jelas ini membawa Turki pada kondisi yang dianggap mencederai demokrasi, tetapi hal ini tidak dihiraukan pemerintah Turki dengan dasar untuk meminimalisir risiko yang akan diterima negara jika membiarkan para tersangka beraktivitas bebas. Dengan berbagai dinamika pemisahan tindakan politis dari dasar aktual yang terjadi di Turki ini menunjukkan bahwa

Turki menggunakan manajemen risiko dalam pembuatan kebijakannya.

2) **Dinamika Depolitisasi Pembuatan Kebijakan Keamanan**

Dua aspek yang digunakan Selchow (2014) untuk melihat depolitisasi pembuatan kebijakan keamanan yaitu kepura-puraan objektivitas dan pengkategorian kasus juga terjadi di Turki pasca-kudeta di tahun 2016. Sejak tragedi ini, pemerintah melakukan upaya pembersihan tubuh negara dari kelompok FETO dengan mengawasi dan mengumpulkan data-data individu yang dinilai terasosiasi dengan kelompok tersebut. Tindakan-tindakan dalam rangka pembersihan tubuh negara ini menyentuh setiap kementerian, kantor pemerintah, dan lembaga negara. Hal ini terwujud dalam pemecatan hingga 50.000 guru, dekan universitas, hakim, jaksa, dan jurnalis yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok FETO. Selain itu, tindakan lain yang dilakukan pemerintah Turki adalah menyita 1000 perusahaan yang terhubung langsung dengan kelompok FETO dan menyita

ribuan aset yang dimiliki *Gülenists* senior (Aydintasbas, 2016).

Kebijakan keamanan ini dilakukan pemerintah Turki dengan mengikuti prosedur logika risiko yang mengedepankan objektivitas dan bebas nilai, tanpa melihat aspek-aspek atau nilai-nilai lain. Jika menurut sistem untuk mendeteksi ancaman yang digunakan oleh pemerintah Turki menyatakan individu tersebut ‘berbahaya’ karena terasosiasi dengan jaringan kelompok FETO, maka dia akan ditangkap tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh. Aydintasbas (2016) menjelaskan bahwa ribuan warga Turki yang divonis memiliki hubungan dengan kelompok FETO tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya karena pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk menempuh jalur hukum. Kebijakan dengan sistem ini juga meliputi pembiaran salah tangkap, selama sudah “benar” menurut prosedur. Maka dari itu, dinamika ini juga menunjukkan bahwa Turki menggunakan manajemen risiko.

3) **Dinamika Internalisasi Masalah Keamanan Global**

Pasca kudeta 15 Juli 2016, kelompok FETO ditetapkan sebagai

kelompok teror yang berbahaya oleh pemerintah Turki dan harus diperangi. Salah satu upaya pemerintah Turki untuk menginternalisasi permasalahan kelompok FETO ini adalah dengan mengeluarkan resolusi dewan keagamaan yang dikenal dengan “*RELIGIOUS EXPLOITATION AND GULEN TERRORIST ORGANIZATION: EXTRAORDINARY RELIGIOUS COUNCIL RESOLUTIONS*”.

Dalam konten resolusi dewan keagamaan Turki tentang kelompok FETO ini memuat pandangan dalam bentuk *speech* dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, perwakilan dari Parlemen yaitu Ismail Kahraman, Deputy Menteri Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, dan Presiden Kementerian Keagamaan Prof. Dr. Mehmet Görmez.

Presiden Erdogan memulai pidatonya dengan penjelasan FETO sebagai organisasi keagamaan, sebuah komunitas, institusi yang bergerak di bidang pendidikan, yang meresahkan negara. Selama 40 tahun FETO telah berkembang seperti sel kanker atau seperti virus infeksi yang membahayakan (Resolusi Dewan Keagamaan, 2016). Presiden Erdogan juga

menyebutkan bahwa FETO adalah organisasi keagamaan bersenjata yang bersembunyi di tubuh militer Turki. Ia juga menyebutkan bahwa FETO adalah dalang dari kudeta gagal 15 Juli 2016 karena FETO memiliki peluru dan bom di F-16, F-4, tank, tameng, dan helikopter yang dibeli dengan pajak negara. Dalam pidatonya secara keseluruhan Presiden Erdogan menjelaskan bahwa dasar keyakinan gerakan FETO atau ideologi kelompok ini adalah penyimpangan pemaknaan ideologi Islam itu sendiri dan hal ini membahayakan. Pidato yang disampaikan Ismail Kahraman, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, dan Prof. Dr. Mehmet Görmez memiliki pesan yang sama bahwa FETO adalah kelompok teror berbahaya dan harus diperangi.

Isi dari resolusi keagamaan itu sendiri memuat hal-hal sebagai berikut: 1) *Fetullahist Terror Organisation* (FETO) tidak bisa dikarakterisasi sebagai badan agama, 2) gelar-gelar yang ditetapkan untuk pemimpin FETO bertentangan dengan Islam, 3) FETO adalah gerakan yang mengeksploitasi agama, 4) FETO adalah gerakan kekuatan dan kepentingan dengan penyamaran

agama, 5) FETO adalah gerakan 'Mahdi' palsu, 6) FETO memiliki sumber-sumber pengetahuan agama yang tidak relevan, 6) FETO adalah gerakan yang memecah kesatuan umat, 7) FETO adalah gerakan rahasia tidak bermoral, 8) FETO adalah gerakan tidak beretika, 9) FETO melanggar hak muslim dan hak publik untuk kepentingan sendiri, 10) FETO mengeksploitasi zakat, sumbangan, amal orang miskin dan mengubahnya ke dalam pemerasan dalam kedok penghormatan, 11) FETO adalah gerakan yang menggunakan teknik keagamaan untuk dialog kepercayaan dan memecah kalimat tauhid, 12) FETO mengedukasi generasi di di Eurasia dengan konsep Islam yang kosong, 13) kerusakan yang disebabkan FETO di negara harus dioperasikan dan harus ditaksir, 15) komisi bersama akan didirikan untuk memperkirakan kerusakan yang dipengaruhi oleh FETO pada kehidupan beragama, 14) pendidikan agama di semua tingkat akan ditinjau, 15) pekerjaan kooperatif akan diinisiasi bersama NGO untuk menghindari kemunculan grup yang sama dan mengulang kesalahan yang sama,

16) hubungan agama-negara-masyarakat harus dibangun di dasar yang solid, 17) studi akan dilakukan untuk warga negara terutama generasi muda untuk mencegah kerusakan spiritual (Resolusi Dewan Keagamaan, 2016).

Pemerintah Turki pada masa Presiden Erdogan memiliki komitmen terhadap resolusi ini dan menyebarkan resolusi dewan keagamaan terkait FETO ini di ruang publik agar diketahui oleh masyarakat luas. Seperti yang dipaparkan oleh Dogan (2020), Presiden Erdogan secara terbuka menyatakan "perburuan penyihir" terhadap FETO dan ironisnya hal ini menerima dukungan besar dari banyak elemen masyarakat seperti dari *Diyamet* (Direktorat Urusan Agama di Turki), kelompok agama, cendekiawan Muslim, dan tokoh masyarakat. Presiden Erdogan telah menggunakan pidato kebencian terhadap para pengikut gerakan FETO (Erdogan, 2020: 125). Dengan cara ini pemerintah Turki menginternalisasi persoalan bahaya FETO kepada masyarakatnya agar persepsi masyarakat terhadap FETO sejalan dengan pemerintah. Melalui dinamika internalisasi masalah keamanan global yang dilakukan

pemerintah Turki ini juga bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan indikator bahwa pemerintah Turki pada masa Presiden Erdogan menggunakan manajemen risiko dalam kebijakannya.

4) Dinamika Memperluas Proses Sekuritisasi

Dalam upaya memitigasi terorisme kelompok FETO, Presiden Erdogan secara aktif mempropagandakan bahaya FETO baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Setelah menggunakan *speech act* untuk menginternalisasi bahaya FETO di dalam negeri, Presiden Erdogan menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan kekuatan FETO di luar negeri. Presiden Erdogan menginstruksikan kementerian luar negeri Turki, penegakan hukum, dan dinas intelijen untuk memerangi gerakan kelompok FETO di luar negeri. Manifestasi dari tindakan ini adalah penutupan sekolah yang terafiliasi dengan kelompok FETO di AS, Eropa, dan Afrika (Aydintasbas, 2016). Indonesia juga merupakan termasuk negara yang dihimbau untuk menutup sekolah Turki yang diduga terafiliasi dengan FETO, walaupun hal ini menjadi perdebatan di antara pejabat tinggi negara seperti

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2016 (Pratama & Sinuko, 2016)

Dampak Manajemen Risiko dalam Mitigasi Terorisme Kelompok FETO

Penerapan manajemen risiko dalam kebijakan mitigasi kelompok FETO memunculkan risiko baru yang meliputi beberapa aspek. Aspek pertama yang terdampak dari manajemen risiko baru ialah aspek Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memiliki kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan. Dengan kebijakan penutupan sekolah yang diduga terafiliasi dengan FETO di berbagai wilayah, bahkan di luar Turki, membuat banyak anak-anak secara terpaksa harus menghentikan proses pendidikan formal, baik bersifat sementara maupun permanen. Selain kebijakan penutupan sekolah yang terafiliasi dengan FETO, pemecatan besar-besaran individu yang diduga termasuk jaringan FETO juga berdampak pada keterbatasan hak-hak individu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Semua kebijakan-kebijakan yang mengikuti logika risiko ini dilakukan tanpa melihat aspek lain, termasuk hal ini.

Selain pelanggaran HAM, aspek yang terdampak oleh penerapan manajemen risiko dalam kebijakan adalah degradasi demokrasi. Selama beberapa dekade terakhir, Turki adalah negara yang

tidak bisa diukur dengan standar politik barat karena peran yang dimainkan tentara dalam negara. Menyadari kebutuhan akan Demokrasi di Turki, Presiden Erdogan berkeyakinan bahwa ia dapat membawa demokrasi liberal, standar PBB dan hak asasi manusia universal kepada negara, sehingga AKP menerima dukungan besar dari berbagai segmen masyarakat termasuk pemerintah. Awalnya, AKP menawarkan proses demokratisasi dan normalisasi yang signifikan dilakukan oleh AKP seperti perdamaian sosial Turki, stabilitas politik, menumbuhkan kemakmuran, pengembangan demokrasi, dan supremasi hukum (Dogan, 2020:117). Tapi pada proses pelaksanaannya, Presiden Erdogan membawa Turki menjadi negara yang semakin otokratik terutama pasca gagal kudeta 15 Juli 2016. Turki yang semula memiliki sistem parlementer, di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan sistem ini perlahan menjadi sistem presidensial dengan kuasa penuh pada presiden. Hal ini pertama kali terwujud dalam dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Erdogan untuk menyatakan keadaan darurat pasca kudeta dan menetapkan FETO sebagai kelompok teroris yang berbahaya.

Dalam menindaklanjuti keadaan ini, Presiden Erdogan memberlakukan kebijakan pembatasan akses ke layanan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter,

YouTube sering digunakan di Turki dan atas perintah pengadilan, akses ke sekitar 70.000 alamat URL internet dibatasi secara permanen (Dogan, 2020). Presiden Erdogan ingin membatasi akses ke situs web apa pun yang menantang kewenangannya dengan menggunakan prosedur administrasi. Dia memerintahkan penyedia Internet untuk mengarsipkan data mengenai aktivitas pengguna dan membagikannya dengan otoritas negara. Freedom House Foundation telah menggolongkan Turki sebagai tidak bebas dalam hal kebebasan pers karena kontrol ketat AKP atas semua media, surat kabar, dan stasiun TV di Turki. Hampir semua saluran berita menyiarkan pidato Erdogan secara bersamaan. Dengan semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Erdogan ini secara otomatis bertentangan dengan upaya pemerintah Turki yang berkomitmen untuk menjadi negara demokrasi.

Maka dari itu, manajemen risiko dalam mitigasi terorisme kelompok FETO telah menyebabkan penumpasan massal hingga mencapai 145.711 orang dipecat, 124.257 ditahan dan 57.885 ditangkap (Dogan, 2020). Tidak berhenti sampai di sana, ribuan sekolah, asrama, dan universitas ditutup oleh pemerintah AKP, 8573 akademisi kehilangan pekerjaan mereka, 4424 hakim/jaksa dipecat, 44.385 pegawai dari Kementerian Pendidikan

diberhentikan, 184 media ditutup dan 274 jurnalis ditangkap (Dogan, 2020:127). Dengan semua angka ini, menjadi sebuah indikator bahwa pemerintahan Presiden Erdogan tidak memberikan kebebasan pada masyarakat Turki untuk memiliki ideologi yang berbeda dengan negara. Hal ini disebabkan negara yang mempersepsikan kelompok FETO sebagai ancaman.

Kesimpulan

Gulen Movement yang memiliki pandangan ‘*al-Islam din wa dawla*’ bahwa Islam mencakup agama dan negara membuatnya memiliki pandangan tersendiri terhadap tatanan negara dan berusaha mewujudkannya. Dengan pandangannya tersebut dan jaringan yang kuat di lebih dari 150 negara, Gerakan Gulen dianggap mengancam eksistensi ideologi negara Turki terutama di masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gerakan Gulen dituduh oleh Presiden Erdogan bertanggung jawab atas tragedi Kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016. Walaupun pada awalnya Gerakan Gulen merupakan sekutu Presiden Erdogan, pasca kudeta tersebut Gerakan Gulen ditetapkan sebagai gerakan yang berbahaya. Cap teroris pun disematkan oleh Presiden Erdogan pada Gerakan Gulen sehingga kelompok ini dikenal dengan *Fethullah Gulen Terrorist Organization* (FETO).

Setelah Gerakan Gulen ditetapkan sebagai kelompok teror, pemerintahan Turki pada masa Presiden Erdogan mengambil kebijakan anti-teror yang menerapkan manajemen risiko di dalamnya. Penerapan manajemen risiko ini dapat dilihat melalui empat dinamika milik Selchow (2014) yang dilakukan pemerintah Turki dalam memitigasi terorisme, khususnya pada individu terlibat kelompok FETO. Dengan menggunakan logika risiko dalam pembuatan kebijakan anti-teror, hal ini menjembatani pemerintah Turki untuk melakukan berbagai tindak pengamanan baik yang bersifat preventif, hingga represif, meski tak jarang tindakan yang diambil pemerintah Turki berdampak pada munculnya risiko baru.

Risiko baru yang muncul dalam mitigasi terorisme kelompok FETO yang dilakukan pemerintahan Turki pada masa Presiden Erdogan adalah degradasi demokrasi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya warga Turki yang terkena agenda “pembersihan”. Operasi pembersihan terhadap warga negara Turki yang disinyalir berhubungan dengan kelompok FETO dapat berbentuk pemberhentian dari tempat kerja, penutupan sekolah, penangkapan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membersihkan badan pemerintahan Turki dari infiltrasi jaringan kelompok FETO yang bekerja di dalamnya, bahkan

menghentikan berbagai gerakan yang diinisiasi oleh kelompok FETO. Tetapi di sisi lain, tindakan ini berdampak pada pembatasan warga negara mendapatkan akses hidup layak, semisal hak mendapatkan pendidikan dan bekerja. Maka dari itu, manajemen risiko dalam mitigasi terorisme kelompok FETO yang dilakukan oleh pemerintahan Turki pada masa Presiden Erdogan menjadi sebuah problematika baru.

REFERENSI

- Aydintasbas, A. 2016. *The Good, The Bad, and The Gulenists: The Role of The Gulen Movement in Turkey’s Coup Attempt*. European Council on Foreign Relations.
- BBC Indonesia. 2018. *Buntut kudeta yang gagal, Turki kembali pecat 18.000 tentara, polisi, guru dan PNS*. <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44756169>>, diakses pada 12 september 2020
- Dogan, R. 2020. *Political Islamists in Turkey and the Gülen Movement*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Hardoko, Evan. 2017. *Turki Bekukan Paspor Pebasket NBA Pendukung Fethullah Gulen*. <<https://internasional.kompas.com/read/2017/05/22/08480941/turki.bekukan.paspor.pebasket.nba.pendukung.fethullah.gulen>>, diakses pada 12 september 2020
- Pratama, Aulia Bintang & Sinuko, Damar. 2016. *Penutupan Sekolah Afiliasi Gulen Tidak Mudah*. (Online) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729194846-20-148033/penutupan-sekolah-afiliasi>>

[fethullah-gulen-tidak-mudah](#)>,
diakses pada 15 Spetember 2020

- Selchow, S. 2015. Chapter 4: Security Policy and (Global) Risk(s). In M. K. Rangelov, *The Handbook of Global Security Policy* (p. 541). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Rohman, Syaiful & Nurhasanah, Siti (2019). Paham Radikalisme Berdasarkan Perspektif Agama (Radicalism Based On Religious Perspective), *Journal of Terrorism Studies*, Volume 1, No. 1 ISSN : 2656-9965
- Taş, Hakki. 2018. A history of Turkey's AKP-Gülen conflict, *Mediterranean Politics*, 23:3, 395-402, DOI: 10.1080/13629395.2017.1328766
- Tunggul, Lucie. 2018. "The Lost Opportunity Window of the Gulen Movement in Turkey". *Slovak Journal of Political Sciences*.
- Yaya, Mehmet. 2009. "Terrorism and Tourism: The Case of Turkey". *Defence and Peace Economics*, 20:6, 477-497